



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jendral Sudirman Painan – Sago Telp/Fax (0756) 7464239



**REVISI**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**( R K P D )**  
**TAHUN 2019**



**DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan didukung dengan sumber daya yang handal sehingga terwujudnya pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Painan, 5 Maret 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Ir. NUZIRWAN N, MT**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19670826 199803 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun Lalu ..	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan .....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	15
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan .....	16
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	16
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan .....	16
3.3 Program dan Kegiatan .....	20
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	25
BAB V Penutup .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja Perangkat Daerah serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Renja Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan adalah menterjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan

strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam perspektif jangka panjang, paradigma tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintah Daerah yang bercirikan “Good Governance” yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis dengan memiliki aparatur Negara yang Bersih, bertanggung jawab dan profesional dalam masing-masing bidangnya, sehingga mempercepat proses tercapainya masyarakat yang lebih beradab (Civilized Society) sebagai bagian integral dan sistematis dan proses pembangunan daerah.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat diperlukan dukungan aparatur profesional, responsif, tanggap dan aspiratif. Selanjutnya untuk melaksanakan renja secara utuh diperlukan pembiayaan yang memadai, peralatan/sarana yang lengkap dengan organisasi dan manajemen yang kondusif di tingkat daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - l. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal
  - m. PermenPANRB 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
  - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan guna melaksanakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun 2019.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Dinas

Perhubungan adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pelaksanaan RKPD Kab. Pesisir Selatan tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Merumuskan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sesuai dengan program prioritas/unggulan pembangunan di sektor Perhubungan

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

## **BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Perhubungan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perhubungan, Analisis Kinerja Dinas Perhubungan, Isu Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN**

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2017, Indikator Kinerja Dinas Perhubungan serta Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN**

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 juga harus dilakukan evaluasi.

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar **Rp. 6.927.630.249,-** (termasuk perubahan) dengan 12 program dan 37 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp. 6.757.122.640,-** dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,54%.

Untuk lebih lengkapnya hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 pada tabel berikut ini :









## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas**

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan sebagian kewenangan urusan rumah tangga Daerah (desentralisasi) di bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, serta sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan jaringan transportasi
2. Pengendalian dan operasional dampak lalu lintas baik di darat maupun di laut
3. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
4. Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas baik di darat maupun di laut
5. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
6. Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran dan terminal;
7. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

Disamping sebagai dinas teknis, Dinas Perhubungan diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Tingkat pencapaian PAD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar Rp. 1.039.031.500,- atau sebesar 92% dari target Rp. 1.124.300.000,- pada tahun 2017. Capaian target PAD tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan menunjukkan performa yang sangat baik.

### 2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pelaksanaan otonomi daerah yang cepat, jumlah penduduk yang sangat tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan membawa dampak perubahan yang begitu cepat terhadap gaya hidup dan pola hidup masyarakat. Hal ini jelas membawa dampak terhadap pola pergerakan baik orang maupun barang dari dan ke Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan perlu terus menerus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan. Dengan meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan (darat dan laut) sesuai dengan visi yang diemban yaitu ***“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, lancar, aman dan nyaman guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”***

Untuk menciptakan situasi dan kondisi tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang kondusif serta SDM yang berkualitas guna penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu maka dari itu isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perlu diimbangi dengan manajemen dan penanganan sektor perhubungan yang signifikan diantaranya :

#### 1. Perhubungan Darat

Untuk memperlancar arus lalu lintas, kenyamanan serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat, menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang perhubungan darat sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya :

- a. Melengkapi fasilitas lalu lintas seperti traffic light, warning light, marka jalan, halte, RPPJ, rambu-rambu standar, zona selamat sekolah, penerangan jalan umum, guard rail, paku marka, patok pengaman jalan dan cermin lalu lintas

- b. Melakukan perawatan fasilitas lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
- c. Melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap sistem operasi angkutan umum baik yang plat kuning maupun plat hitam.
- d. Melengkapi fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, fasilitas penyeberangan seperti zebra cross, jembatan penyeberangan dan sinyal khusus bagi pejalan kaki yang diatur dengan lampu lalu lintas (traffic light).
- e. Melakukan penataan kembali merupakan sistem parkir yang lebih terpadu dan terkontrol serta didukung oleh sarana dan prasarana/fasilitas terminal dan perpakiran
- f. Mengikutsertakan staf dan diklat teknis perhubungan darat.

## 2. Perhubungan Laut

Untuk menciptakan kelancaran pergerakan orang maupun barang yang melintas melalui laut dan menjaga keselamatan pelayaran serta menjamin kelaiklautan terhadap kapal-kapal yang bertonase kotor GT<7 maka ditetapkanlah sebagai berikut :

- a. Pengadaan konstruksi dermaga/tambatan kapal dan pengadaan konstruksi jembatan dermaga/tambatan kapal wisata
- b. Melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur.
- c. Melengkapi fasilitas penunjang keselamatan pelayaran seperti kapal patroli, menara pengawas, tower komunikasi, rambu-rambu Lalu Lintas laut dll.
- d. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan pelayaran transportasi laut sehingga faktor keselamatan terjamin



- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan laut
- f. Mengikutsertakan staf dalam diklat teknis perhubungan laut

### 3. Pengujian Kendaraan Bermotor

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan KIR ulang dan juga sebagai sektor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

- a. Meningkatkan Pelayanan pengujian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku
- b. Pembangunan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- c. Pengadaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor.
- d. Memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat teknis Pengujian Kendaraan Bermotor kepada PNS yang berada di bagian pengujian.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja memuat informasi tentang Rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada akhirnya dilakukan identifikasi program dan

kegiatan prioritas yang akan didanai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun ABPN.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan akan merespon usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan di dapatkan beberapa hal yang perlu direkomendasikan segera antara lain :

1. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti warning light, penerangan jalan umum, rambu-rambu standar, RPPJ, marka jalan, paku marka jalan, patok pengaman jalan, guard rill, cermin lalu lintas, zona selamat sekolah dll.
2. Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan lalu lintas
3. Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, dermaga, halte, pengujian kendaraan bermotor dll.
4. Pengadaan alat transportasi pedesaan seperti bus angkutan umum dan bus sekolah di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Pengujian kendaraan bermotor (KIR) keliling untuk meningkatkan laik jalan kendaraan yang berada dikecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA TAHUN 2019**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir selatan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP, RPJM, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RPJMD dan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan

#### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis lingkup bidang perhubungan.

## ❖ **Visi dan Misi Organisasi**

### ❖ **Visi**

***“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, lancar, aman dan nyaman guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”***

### ❖ **Misi**

1. Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
4. Memperluas jaringan pelayanan transportasi

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata.

Dari uraian di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan misi adalah sebagai berikut :

#### ➤ **Misi Pertama :**

Menjalankan Administrasi Perkantoran secara profesional

#### **Tujuan 1**

Terlaksananya pelayanan administrasi yang baik dan profesional

#### **Sasaran**

Terciptanya tertib administrasi perkantoran dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

**Tujuan 2**

Mengoptimalkan sarana dan prasarana

**Sasaran**

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparaturnya sesuai dengan kebutuhan

**Tujuan 3**

Meningkatkan Disiplin Aparatur

**Sasaran**

Meningkatnya disiplin aparaturnya dalam melaksanakan tugas

**Tujuan 4**

Meningkatnya kemampuan aparaturnya yang dibutuhkan dalam tata cara pemerintahan yang baik

**Sasaran**

Memiliki aparaturnya yang berkualitas di bidang administrasi

➤ **Misi Kedua :**

Meningkatkan pembinaan, pengawasan dalam rangka menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan

**Tujuan**

Adanya pemahaman tentang pentingnya tertib dalam berlalu lintas

**Sasaran**

Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas dan pengoperasian angkutan di jalan

➤ **Misi Ketiga :**

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

**Tujuan**

Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi

**Sasaran**

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai

➤ **Misi Keempat :**

Meningkatkan dan memperluas jaringan pelayanan transportasi

**Tujuan**

Melakukan pembangunan terminal dan dermaga yang menjadi simpul transportasi di kecamatan-kecamatan Kabupaten Pesisir selatan

**Sasaran**

Tersedianya jaringan transportasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

**Starategi**

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Strategi tersebut adalah :

1. Melaksanakan administrasi perkantoran sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Menyediakan sarana prasarana yang memadai dibidang administrasi
3. Pembagian tanggung jawab kerja sesuai tupoksi bidang masing-masing aparatur
4. Mengirimkan aparatur untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan
5. Melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
6. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
7. Pembangunan terminal dan dermaga.

## **Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, cepat dan tepat
2. Sarana dan prasarana yang memadai
3. Pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi aparatur dalam pelaksanaan tugas
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur
5. Pembinaan dalam berlalu lintas dan angkutan
6. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi
7. Menyediakan jaringan pelayanan transportasi yang memadai.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat di uraikan sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
  - m. Penyediaan jasa tenaga kerja non PNS
  - n. Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan
  - o. Penyusunan rencana strategis SKPD
  - p. Peringatan hari perhubungan nasional
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
- Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan Meubiler
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - e. Pembangunan tempat parkir
  - f. Perencanaan pembangunan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - b. Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan PKB
  - c. Diklat Teknis Perhubungan



5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan :

- a. Monitoring dan evaluasi kegiatan
- b. Pengembangan dan peningkatan data dan informasi perhubungan

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penyusunan alur jaringan trayek transportasi laut

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas
- b. Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR)
- c. Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal dan pelabuhan

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
- b. Penunjang kegiatan WTN
- c. Pengawasan dan pengendalian LLAJ
- d. Operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut
- e. Pembinaan dan penertiban lalu lintas angkutan laut
- f. Pelajar pelopor keselamatan belalu lintas
- g. Pemilihan sopir teladan (Abiyasa)
- h. Operasional transportasi pelayanan pendidikan

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pembangunan halte bus
- b. Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)
- c. Pengadaan bus sekolah
- d. Pembangunan dermaga/tambatan kapal/perahu
- e. Pembangunan terminal tipe C

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pengadaan dan pemasangan alat keselamatan lalu lintas
- b. Pengadaan rambu-rambu RPPJ
- c. Identifikasi dan pemberian nama jalan
- d. Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan
- e. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum
- f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala lampu penerangan jalan umum

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- b. Pembangunan fasilitas pelayanan PKB

12. Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perparkiran

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pelayanan terminal dan perpakiran
- b. Pengadaaan Portal Parkir Elektrik

c. Pembangunan posko petugas parkir di carocok painan

13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

a. Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah















## **BAB V**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2019, yang memuat rencana kerja dan pendanaannya. Rencana Kerja SKPD harus tetap dijaga konsistensinya sesuai Tupoksi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perhubungan Kabupaten pesisir Selatan berkomitmen untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan SKPDnya yang akan dicapai dalam 5 Tahun ke depan. Dengan cara menyusun program/kegiatan yang terdapat dalam renja, mengevaluasi Renstra dan Renja yang telah berjalan serta mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih.

Painan, 5 Maret 2018  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Ir. NUZIRWAN N, MT**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19670826 199803 1 001

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017  
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	DINNAS PERHUBUNGAN	5.613.421.729	6.927.630.249	1.314.208.520		5.787.091.814	6.757.122.640	97,54	100,00	
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	689.427.129	1.025.324.990	335.897.861		833.436.398	1.006.228.239	98,14	100,00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.800.000	85.700.000	22.900.000	VERAWATI, S.Sos	68.297.230	75.494.991	88,09	100,00	
	- Belanja Pegawai		2.500.000	2.500.000			2.500.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	49.800.000	70.200.000	20.400.000		55.300.730	59.998.491	85,47	100,00	
	- Belanja Modal	13.000.000	13.000.000	-		12.996.500	12.996.500	99,97	100,00	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.250.000	260.100.000	161.850.000	VERAWATI, S.Sos	186.000.000	257.110.000	98,85	100,00	
	- Belanja Pegawai	750.000	1.500.000	750.000		-	450.000	60,00	100,00	
	- Belanja Modal	97.500.000	258.600.000	161.100.000		186.000.000	256.660.000	99,25	100,00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	57.000.000	71.737.000	14.737.000	VERAWATI, S.Sos	57.895.000	71.737.000	100,00	100,00	
	- Belanja Pegawai	50.700.000	65.200.000	14.500.000		52.000.000	65.200.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	6.300.000	6.537.000	237.000		5.895.000	6.537.000	100,00	100,00	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.091.240	33.183.000	1.091.760	VERAWATI, S.Sos	29.838.000	32.433.000	97,74	100,00	
	- Belanja Pegawai	29.250.000	29.000.000	(250.000)		26.250.000	28.250.000	97,41	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	2.841.240	4.183.000	1.341.760		3.588.000	4.183.000	100,00	100,00	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10.954.000	16.054.000	5.100.000	VERAWATI, S.Sos	12.766.500	16.054.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	10.954.000	16.054.000	5.100.000		12.766.500	16.054.000	100,00	100,00	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	31.397.469	42.221.070	10.823.601	VERAWATI, S.Sos	37.330.740	42.221.070	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	31.397.469	42.221.070	10.823.601		37.330.740	42.221.070	100,00	100,00	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.172.320	57.844.820	15.672.500	VERAWATI, S.Sos	52.928.650	57.844.820	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	42.172.320	57.844.820	15.672.500		52.928.650	57.844.820	100,00	100,00	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	9.357.000	12.025.000	2.668.000	VERAWATI, S.Sos	9.531.000	12.025.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	9.357.000	12.025.000	2.668.000		9.531.000	12.025.000	100,00	100,00	
9	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.400.000	15.400.000	-	VERAWATI, S.Sos	13.000.000	15.400.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	15.400.000	15.400.000	-		13.000.000	15.400.000	100,00	100,00	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.350.000	36.235.000	10.885.000	VERAWATI, S.Sos	28.985.000	33.560.000	92,62	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	25.350.000	36.235.000	10.885.000		28.985.000	33.560.000	92,62	100,00	
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	130.950.000	163.000.000	32.050.000	VERAWATI, S.Sos	138.719.758	162.101.758	99,45	100,00	
	- Belanja Pegawai	11.400.000	-	(11.400.000)		-	-	-	-	
	- Belanja Barang dan Jasa	119.550.000	163.000.000	43.450.000		138.719.758	162.101.758	99,45	100,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah - Belanja Barang dan Jasa	124.500.000 124.500.000	159.500.000 159.500.000	35.000.000 35.000.000	VERAWATI,S.Sos	139.400.000 139.400.000	159.175.000 159.175.000	99,80 99,80	100,00 100,00	
	13 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	36.205.100 4.500.000 31.705.100	59.325.100 14.400.000 44.925.100	23.120.000 9.900.000 13.220.000	VERAWATI,S.Sos	47.744.520 11.298.000 36.446.520	58.071.600 14.334.000 43.737.600	97,89 99,54 97,36	100,00 100,00 100,00	
	14 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS - Belanja Pegawai	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	- -	VERAWATI,S.Sos	11.000.000 11.000.000	13.000.000 13.000.000	100,00 100,00	100,00 100,00	
<b>B.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>789.155.500</b>	<b>897.251.500</b>	<b>108.096.000</b>		<b>784.260.900</b>	<b>886.307.350</b>	<b>98,78</b>	<b>100,00</b>	
	15 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Belanja Pegawai - Belanja Modal	545.000.000 10.800.000 534.200.000	533.450.000 - 533.450.000	(11.550.000) (10.800.000) (750.000)	VERAWATI,S.Sos	532.471.100 - 532.471.100	532.871.100 - 532.871.100	99,89 - 99,89	100,00 - 100,00	
	16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	67.750.000 2.750.000 65.000.000	126.500.000 11.500.000 115.000.000	58.750.000 8.750.000 50.000.000	VERAWATI,S.Sos	71.750.000 6.750.000 65.000.000	126.500.000 11.500.000 115.000.000	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	
	17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	176.405.500 10.000.000 176.405.500	237.301.500 10.000.000 227.301.500	60.896.000 10.000.000 50.896.000	VERAWATI,S.Sos	180.039.800 6.000.000 180.039.800	226.936.250 10.000.000 216.936.250	95,63 100,00 95,44	100,00 100,00 100,00	
<b>C.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>-</b>	<b>103.883.800</b>	<b>103.883.800</b>		<b>-</b>	<b>103.833.800</b>	<b>99,95</b>	<b>100,00</b>	
	18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya (PDH) - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	- 600.000 -	103.883.800 600.000 103.283.800	103.883.800 600.000 103.283.800	VERAWATI,S.Sos	- 600.000 103.233.800	103.833.800 600.000 103.233.800	99,95 100,00 99,95	100,00 100,00 100,00	
<b>D.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>45.000.000</b>	<b>42.500.000</b>	<b>(2.500.000)</b>		<b>41.476.650</b>	<b>41.476.650</b>	<b>97,59</b>	<b>100,00</b>	
	19 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Belanja Barang dan Jasa	45.000.000 45.000.000	42.500.000 42.500.000	(2.500.000) (2.500.000)	VERAWATI,S.Sos	41.476.650 41.476.650	41.476.650 41.476.650	97,59 97,59	100,00 100,00	
<b>E</b>	<b>PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>47.467.280</b>	<b>115.048.440</b>	<b>67.581.160</b>		<b>76.297.240</b>	<b>113.907.956</b>	<b>99,01</b>	<b>100,00</b>	
	20 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan - Belanja Barang dan Jasa	47.467.280 47.467.280	115.048.440 115.048.440	67.581.160 67.581.160	VERAWATI,S.Sos	76.297.240 76.297.240	113.907.956 113.907.956	99,01 99,01	100,00 100,00	
<b>E.</b>	<b>PROG. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	<b>2.549.328.110</b>	<b>2.668.695.610</b>	<b>119.367.500</b>		<b>2.432.303.056</b>	<b>2.548.075.476</b>	<b>95,48</b>	<b>100,00</b>	
	21 Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	44.337.630 3.600.000 40.737.630	52.487.630 3.600.000 48.887.630	8.150.000 - 8.150.000	MARTALENA,SH	49.031.025 3.000.000 46.031.025	51.074.025 3.600.000 47.474.025	97,31 100,00 97,11	100,00 100,00 100,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22 Pembangunan Dermaga/Tambatan Perahu	-	110.017.500	110.017.500	NOFRIZON, S.Sos	4.922.244	108.203.744	98,35	100,00	
	- Belanja Pegawai	-	1.500.000	1.500.000		-	1.500.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	-	108.517.500	108.517.500		4.922.244	106.703.744	98,33	100,00	
	23 Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (DAK)	2.455.000.000	2.455.000.000	-	AFRIOLDI PUTRA, A.Md	2.334.934.877	2.341.979.877	95,40	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	122.750.000	122.750.000	-		113.184.877	120.229.877	97,95	100,00	
	- Belanja Hibah	2.332.250.000	2.332.250.000	-		2.221.750.000	2.221.750.000	95,26	100,00	
	24 Pembangunan Fasilitas Transportasi Pedesaan (Penunjang DAK)	49.990.480	51.190.480	1.200.000	AFRIOLDI PUTRA, A.Md	43.414.910	46.817.830	91,46	100,00	
	- Belanja Pegawai	10.200.000	15.900.000	5.700.000		12.450.000	14.450.000	90,88	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	39.790.480	35.290.480	(4.500.000)		30.964.910	32.367.830	91,72	100,00	
<b>F.</b>	<b>PROG. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ</b>	<b>125.985.420</b>	<b>162.635.420</b>	<b>36.650.000</b>		<b>118.086.450</b>	<b>160.059.920</b>	<b>98,42</b>	<b>100,00</b>	
	25 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	65.700.200	66.500.200	800.000	ARLIM ARIF	64.441.450	64.141.450	96,45	100,00	
	- Belanja Pegawai	3.800.000	4.600.000	800.000		2.600.000	2.300.000	50,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	61.900.200	61.900.200	-		61.841.450	61.841.450	99,91	100,00	
	26 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pos Retribusi (TPR)	60.285.220	96.135.220	35.850.000	VERAWATI, S.Sos	53.645.000	95.918.470	99,77	100,00	
	- Belanja Pegawai	750.000	2.200.000	1.450.000		600.000	2.200.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	59.535.220	93.935.220	34.400.000		53.045.000	93.718.470	99,77	100,00	
<b>G.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN</b>	<b>679.554.440</b>	<b>751.191.690</b>	<b>71.637.250</b>		<b>653.967.920</b>	<b>739.390.190</b>	<b>98,43</b>	<b>100,00</b>	
	27 Koordinasi dan Peningkatan Pelayanan Angkutan	56.695.300	30.860.350	(25.834.950)	EDDY RICARDO, SH	30.814.900	30.814.900	99,85	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	56.695.300	30.860.350	(25.834.950)		30.814.900	30.814.900	99,85	100,00	
	28 Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	105.486.800	145.511.340	40.024.540	ARLIM ARIF	127.164.540	145.064.540	99,69	100,00	
	- Belanja Pegawai	3.600.000	3.600.000	-		3.200.000	3.600.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	101.886.800	141.911.340	40.024.540		123.964.540	141.464.540	99,69	100,00	
	29 Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	94.398.300	94.398.300	-	ERMAN JUSA, SH	83.236.800	94.036.550	99,62	100,00	
	- Belanja Pegawai	9.600.000	7.500.000	(2.100.000)		5.900.000	7.500.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	84.798.300	86.898.300	2.100.000		77.336.800	86.536.550	99,58	100,00	
	30 Pembinaan dan Penertiban Transportasi Perhubungan Laut	89.366.500	100.698.500	11.332.000	YHOHANA RIZA, SH, M.Si	88.131.250	99.357.750	98,67	100,00	
	- Belanja Pegawai	3.600.000	3.600.000	-		2.700.000	3.600.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	85.766.500	97.098.500	11.332.000		85.431.250	95.757.750	98,62	100,00	
	31 Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	22.578.000	32.778.000	10.200.000	DANOFRIN	29.690.500	32.690.500	99,73	100,00	
	- Belanja Pegawai		3.000.000	3.000.000		2.400.000	3.000.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	22.578.000	29.778.000	7.200.000		29.690.500	29.690.500	99,71	100,00	
	32 Pemilihan Sopir Teladan (Abiyasa)	18.684.500	29.034.500	10.350.000	EDDY RICARDO, SH	26.034.500	29.034.500	100,00	100,00	
	- Belanja Pegawai		3.000.000	3.000.000		2.400.000	3.000.000	100,00	100,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	18.684.500	26.034.500	7.350.000		26.034.500	26.034.500	100,00	100,00	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana Sebelum Perubahan	Jumlah Dana Sesudah Perubahan	Selisih (+/-)	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	KET.
							Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33 Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	292.345.040  292.345.040	317.910.700 8.000.000 309.910.700	25.565.660 8.000.000 17.565.660	VERAWATI,S.Sos	268.895.430  268.895.430	308.391.450  308.391.450	97,01 - 99,51	100,00  100,00	
<b>H.</b>	<b>PROG. PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS</b>	<b>105.500.000</b>	<b>322.935.320</b>	<b>217.435.320</b>		<b>112.779.840</b>	<b>322.864.840</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>	
	34 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	105.500.000 1.700.000 103.800.000	322.935.320 4.700.000 318.235.320	217.435.320 3.000.000 214.435.320	ISWARDI, SH, MH	112.779.840 4.100.000 108.679.840	322.864.840 4.700.000 318.164.840	99,98 100,00 99,98	100,00 100,00 100,00	
<b>I.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>	<b>267.121.440</b>	<b>393.643.880</b>	<b>126.522.440</b>		<b>369.222.740</b>	<b>392.333.780</b>	<b>99,67</b>	<b>100,00</b>	
	35 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	267.121.440 11.550.000 255.571.440	393.643.880 11.100.000 382.543.880	126.522.440 (450.000) 126.972.440	FADLI AMRA, SH, MM	369.222.740 8.750.000 360.472.740	392.333.780 10.350.000 381.983.780	99,67 93,24 99,85	100,00 100,00 100,00	
<b>J.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN PELAYANAN TERMINAL DAN PERPAKIRAN</b>	<b>110.097.500</b>	<b>154.456.300</b>	<b>44.358.800</b>		<b>130.089.620</b>	<b>153.881.140</b>	<b>99,63</b>	<b>100,00</b>	
	36 Pelayanan Terminal dan Perpakiran - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	110.097.500 3.600.000 106.497.500	154.456.300 3.600.000 150.856.300	44.358.800 - 44.358.800	DONI HENDRI	130.089.620 3.000.000 127.089.620	153.881.140 3.600.000 150.281.140	99,63 100,00 99,62	100,00 100,00 100,00	
<b>K.</b>	<b>PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>204.784.910</b>	<b>290.063.299</b>	<b>85.278.389</b>		<b>235.171.000</b>	<b>288.763.299</b>	<b>99,55</b>	<b>100,00</b>	
	37 Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa	204.784.910  204.784.910	290.063.299 3.500.000 286.563.299	85.278.389 3.500.000 81.778.389	VERAWATI,S.Sos	235.171.000 3.500.000 235.171.000	288.763.299 3.500.000 285.263.299	99,55 100,00 99,55	100,00 100,00 100,00	
<b>J U M L A H</b>		<b>5.613.421.729</b>	<b>6.927.630.249</b>	<b>1.314.208.520</b>		<b>5.787.091.814</b>	<b>6.757.122.640</b>	<b>97,54</b>	<b>100,00</b>	

**BAB IV**  
**Rencana Kerja dan Pendanaan**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun-2019		Sumber Dana	Lokasi
			Target	Rp		
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>1.053.500.000</b>		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air, telepon dan lain-lain	12 Bulan	80.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor dan operasional pengelola keuangan	12 Bulan	120.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan	3 Orang 1 Paket	50.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
4	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Terlaksananya perawatan peralatan kerja	12 Bulan	30.000.000		Kec. IV Jurai
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	40.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan Tersedianya penggandaan dokumen	12 Bulan	35.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 Bulan	20.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	3 Media	14.500.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan Minum Rapat  Tersedianya Makan Minum Tamu	12 Bulan	50.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun-2019		Sumber Dana	Lokasi
			Target	Rp		
		Tersedianya makan dan minum harian				
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terlaksananya pembayaran jasa keamanan kantor	1 Orang	13.000.000	APBD Kabupaten	Indonesia
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	150.000.000	APBD Kabupaten	Indonesia
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan	100.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
14	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Terlaksananya pembayaran Jasa Tenaga Kerja Non PNS	2 Orang	26.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
15	Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan	9 Dokumen	130.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
16	Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah dokumen rencana strategis perhubungan	1 Dokumen	50.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
17	Peringatan Hari Perhubungan Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari perhubungan Nasional	1 Kali	45.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
II.	<b>Program Peningkatan Sarana &amp; Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur</b>		<b>3.375.000.000</b>		
18	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional	11 unit (1 Unit Mobil KIR Keliling da 4 Unit Kendaraan Roda 2)	1.600.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
19	Pengadaan Meubiler	Terlaksananya pengadaan meubiler	1 Paket	200.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	2 Unit	100.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
21	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya pemeliharaan kenadaraan dinas/operasional	12 Bulan	400.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
22	Pembangunan tempat parkir	Terlaksananya pembangunan tempat parkir	1 Paket	75.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
23	Pembangunan posko petugas parkir	Terlaksananya Pembanunan Posko Petugas parkir	1 Unit	200.000.000	APBD Kabupaten	IV Jurai



No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun-2019		Sumber Dana	Lokasi
			Target	Rp		
24	Pengaspalan Jalan dan Pelataran Parkir Kantor	Terlaksananya Pengaspalan Jalan dan Pelataran Parkir	2 Paket	800.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai dan Rahul Tapan
III.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>		<b>350.000.000</b>		
25	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian	120 Paket	250.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
		Tersedianya pakaian Olah Raga	120 Paket	100.000.000	APBD Kabupaten	Kec. IV Jurai
IV.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>220.000.000</b>		
26	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti siklat/bimtek	1 Paket	45.000.000	APBD Kabupaten	Indonesia
27	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan PKB	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan PKB	3 Orang	75.000.000	APBD Kabupaten	Indonesia
28	Diklat Teknis Perhubungan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Perhubungan	5 Orang	100.000.000	APBD Kabupaten	Indonesia
V.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan penyusunan laporan kinerja dan keuangan</b>		<b>150.000.000</b>		
29	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Lamanya Monitoring dan Evaluasi kegiatan	12 Bulan	150.000.000	APBD Kabupaten	Peisir Selatan
VI.	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Jumlah Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>		<b>50.000.000</b>		
30	Penyusunan Alur Jaringan Trayek transportasi Laut	Jumlah peraturan tentang alur jaringan trayek transportasi laut	1 Perda/ Perbup	50.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
VII.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>		<b>700.000.000</b>		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun-2019		Sumber Dana	Lokasi
			Target	Rp		
31	Rehabilitas/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	Terlaksananya rehabilitasi Terminal/ Pelabuhan yang dipelihara	2 Paket	350.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
32	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Alat Keselamatan Lalu Lintas	5 Paket	250.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
33	Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR)	Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pos retribusi (TPR)	2 Pos TPR	100.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
VIII.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Persentase peningkatan pelayanan angkutan</b>		<b>1.806.000.000</b>		
34	Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	6 Lokasi (15 Kecamatan)	180.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
35	Penunjang Kegiatan WTN	Terlaksananya kegiatan WTN	Piala WTN	100.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
36	Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	12 Bulan	370.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
37	Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	Terlaksananya Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut	12 Bulan	200.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
38	Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Penertiban Lalu Lintas Angkutan Laut	12 Bulan	120.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
39	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas	1 Paket	80.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
40	Pemilihan Sopir Teladan (Abdiyasa)	Terlaksananya Pemilihan Sopir Teladan (Abdiyasa)	1 Paket	80.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
41	Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan	Terlaksananya Operasional Transportasi Pelayanan pendidikan	12 Bulan	300.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
42	Pelayanan terminal dan perpakiran	Terlaksananya Pelayanan Terminal dan Perparkiran	12 Bulan	376.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun-2019		Sumber Dana	Lokasi
			Target	Rp		
IX.	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>		<b>7.300.000.000</b>		
43	Pembangunan halte bus	Terlaksananya Pembangunan halte bus	4 Unit	300.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
44	Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)	Terlaksananya Pembangunan pagar, taman kantor, dan papan nama (merk dinas)	1 Paket	300.000.000	APBD Kabupaten	IV Jurai
45	Pembangunan Dermaga/ Tambatan Kapal	Terlaksananya Dermaga/ Tambatan Kapal	1 Dermaga	2.000.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
46	Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C	1 Terminal	2.000.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
47	Pembangunan Pos Retribusi	Terlaksananya Pembangunan Rest Area	1 Unit	2.500.000.000	APBD Kabupaten	Kecamatan Silaut
48	Pengadaaan Portal Parkir Elektrik	Terlaksananya Pengadaaan Alat Parkir Elektrik	1 Paket	200.000.000	APBD Kabupaten	IV Jurai
X.	<b>Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Persentase Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas</b>		<b>9.229.400.000</b>		
49	Pengadaan dan pemasangan alat keselamatan lalu lintas	Terlaksananya Pengadaan dan pemasangan alat keselamatan lalu lintas	15 Paket (15 Kecamatan)	2.879.400.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
50	Pengadaan Rambu-rambu RPPJ	Terlaksananya Pengadaan Rambu-rambu RPPJ	1 Paket	150.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
51	Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan	1 Paket	200.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
52	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum	15 Kecamatan	1.000.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
53	Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum	Terlaksananya Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	15 Kecamatan	5.000.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
XI.	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>		<b>970.000.000</b>		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tahun-2019		Sumber Dana	Lokasi
			Target	Rp		
54	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	12 Bulan	470.000.000	APBD Kabupaten	IV Jurai
55	Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Pelayanan PKB	1 Paket	500.000.000	APBD Kabupaten	IV Jurai
XII.	<b>Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>350.000.000</b>		
56	Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Lamanya Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	12 Bulan	350.000.000	APBD Kabupaten	Pesisir Selatan
				<b>25.553.900.000</b>		